

## ABSTRAK

Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris. Namun pada kenyataannya yang terjadi dimasyarakat saat ini adalah tidak seluruhnya Notaris tersebut bisa memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah untuk menerima peralihan protokol notaris. Hal ini menyebabkan kesimpangsiuran masyarakat yang membutuhkan protokol notaris tersebut yang seharusnya disimpan dan dipelihara oleh Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah..

Tujuan Penelitian untuk menganalisis : 1) Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap tanggung jawaban protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Jepara. 2) Kewajiban ahli waris terhadap protokol notaris yang meninggal dunia.

Metode pendekatan membahas penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yang dilakukan tergolong dalam penelitian deskriptif analitis Pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Adapun hasil penelitian adalah:1) Peran Majelis Penagawas Daerah terhadap tanggung jawaban protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Jepara yaitu MPD daerah kerja kabupaten Jepara selaku majelis pengawas telah berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris. Ketegasan MPD terutama mengenai protokol Notaris yang harus diterapkan sehingga ketika terjadi seorang Notaris meninggal dunia seperti kasus notaris Muhammad Chaidzar, SH. M.Kn, dan protokolnya Sudah diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD. Aspek hukum yang terkait pertanggungjawaban ahli waris Notaris yang cakap dengan segera menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sebagai Notaris pemegang protokol. 2) Kewajiban Ahli waris terhadap protokol Notaris yang meninggal adalah bahwa arsip Negara yang berupa dokumen yang telah dibuat oleh notaris harus disimpan, dengan cara penyerahan protokol Notaris melalui MPD karena kewenangannya. Tanggungjawab notaris terhadap protokol notaris yang belum diserahkan kepada notaris yang lain dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan cakap hukum. Perbuatan cakap htukum disini diartikan dengan terlaksananya tanggung jawab ahliwaris ddalam melakukan atau menyerahkan protokol almarhum.

**Kata Kunci: Protol Notaris, Notaris Meninggal Dunia, MPD**

## **ABSTRACT**

*Notary is obliged directly to the Notary protocol. But in reality what is happening in the community today is that not all of the Notaries can understand the procedure for the submission of the Notary protocol and are willing to carry out their obligation to submit the Notary Protocol to the Notary who has been appointed by the Regional Supervisory Council to accept the transfer of the notary protocol. This causes confusion among the people who need the notary protocol that should be kept and maintained by a notary appointed by the Regional Supervisory Council.*

*Research Objectives to analyze: 1) The Role of the Regional Supervisory Council towards the responsibility of the notary protocol who has died in Jepara Regency. 2) The heir's obligation to the notary protocol who dies.*

*The approach method to discuss this research is empirical juridical. This type of research is classified as analytical descriptive research. Collecting data obtained from primary data and secondary data, using interview methods and literature studies. Data analysis techniques using qualitative data analysis.*

*The results of the study are: 1) The role of the Regional Board of Supervisors on the responsibility of the notary protocol that has died in Jepara Regency, namely the MPD of the Jepara district working area as the supervisory panel has played an active role in providing guidance and supervision to the Notary Public. The MPD firmness especially regarding the notary protocol that must be applied so that when a notary dies, the case of notary Muhammad Chaidzar, SH. M.Kn, and the protocol has been submitted to another Notary appointed by MPD. Legal aspects related to the responsibility of qualified notary heirs who immediately submit notary protocol to other notaries appointed by MPD as protocol notary holders. 2) The responsibility of the heirs to the protocol of the deceased Notary is that the State archive in the form of documents made by a notary must be kept, by submitting the Notary protocol through the MPD because of its authority. The notary's responsibility to a notary protocol that has not been submitted to another notary in this case can be categorized as a legal competent act. The conduct of legal competence here means the responsibility of the heirs in carrying out or submitting the deceased's protocol.*

*Keywords: Notary Protol, Notary Died, MPD*